

PERANAN PENGENDALIAN INTERN DALAM MENUNJANG PENGAMANAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS KREDIT

Wenny Djuarni

*Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur
No 66 Tlp (0263) 262604. By Pass – Cianjur 43215
e_mail : wenny_dj@yahoo.com*

Abstrak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi dan korelasi. Hasil penelitian pada PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak menunjukkan hubungan Pengendalian Intern dengan Kolektibilitas Kredit sebesar 0,9176 atau 91,76% yang menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara pengendalian intern dengan kolektibilitas kredit. Sementara pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,8281 atau 82,81% dengan persamaan regresi yang terbentuk $Y = 0,675 + 0,85X$ dan setelah dilakukan pengujian hipotesis ternyata pengaruh keduanya signifikan.

Kata Kunci : Pengendalian Intern, Kolektibilitas Kredit

1. Pendahuluan

Sejalan dengan lajunya perkembangan dunia usaha dan majunya sebuah Negara, maka ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mengakibatkan kebutuhan permodalan. Bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan. Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi Bank merupakan perantara diantara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana.

Persaingan antar bank menjadi lebih ketat seperti sekarang ini dan kebutuhan penanaman modal semakin terasa, maka cara yang ditempuh adalah dengan menarik dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk lain. Investor tertarik dengan bank yang mempunyai perputaran uang yang stabil untuk itu bank berlomba-lomba menyalurkan kredit kepada masyarakat, namun seringkali bank mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau biasa disebut sebagai kredit macet, artinya uang yang dipinjam mengalami kemacetan dalam penagihan sehingga likuiditas bank bisa terancam karena kredit yang macet. Untuk mencegah terjadinya kredit macet tersebut maka diperlukan pengamanan atau pembinaan terhadap kredit yang diberikan. Masalah-masalah yang dihadapi bank dalam pemberian kredit tidak hanya disebabkan oleh kelalaian saja, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu didukung dengan pengendalian intern dalam pemberian kredit yang memadai.

Menanggapi semakin merebaknya isu kredit macet akhir-akhir ini di Indonesia, seorang ahli perbankan William Hawort, managing director Barans Group inc, dalam harian umum Republika menjelaskan, "Masalah perkreditan bukan masalah khas

Indonesia saja, dibanyak negara maju masalah ini sering dijumpai, penyebabnya sering kali bersifat klasik yaitu kebebasan pemberian kredit tanpa internal control yang tegas” dengan demikian salah satu penyebab dari permasalahan yang timbul didunia perbankan akhir-akhir ini disebabkan pengendalian intern tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Pengendalian intern merupakan sarana bagi manajemen perusahaan agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi pada seluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan pengendalian intern yang baik akan membantu manajemen dalam melindungi aset perusahaan, tersedia data yang akurat sebagai sarana dalam pengambilan keputusan, serta kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan dilaksanakan sebagaimana mestinya, efektivitas dan efesiensi dapat ditingkatkan dan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba optimal dapat diwujudkan.

PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak adalah nama baru atau pengganti dari PT. BPR Usaha Mitratani dengan SK Bank Indonesia Nomor: 6/9/SKPBI/2004, tertanggal 29 Juni 2004. Adapun yang dikelola dan bidang usaha pokok PT. BPR Universal Cipanas ini adalah menarik dana dari masyarakat dalam bentuk Setoran Tabungan, Deposito dan mengalokasikan kembali dana tersebut berupa kredit kepada masyarakat, disamping pelayanan-pelayanan jasa lainnya.

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka bank dalam hal penyaluran kredit harus direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga penyaluran kredit dapat diterima oleh debitur dan piutang kredit akan dapat diterima kembali oleh bank dengan jumlah dan jangka waktu yang tepat pula. Penerapan Struktur Pengendalian Intern (SPI) yang baik pada proses pemberian kredit merupakan suatu hal yang mutlak perlu dilaksanakan, agar kolektibilitas piutang kredit lebih terjamin.

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis

2.1 Pengertian dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Menurut Kasmir (2002: 34) ”Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan.

Menurut Simongkir (17: 2004) Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.,menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke masyarakatdan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat diatas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

“Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal,

melakukan perasuransian, melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas”

Kasmir (2002: 99). Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan pemberian kredit pada suatu Bank Perkreditan Rakyat adalah: “Mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah.”

Setelah kredit diberikan, maka tugas BPR selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah tersebut. Menurut Thomas Suyatno (2001:23), “Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa, apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan kredit dilakukan terhadap:

- a. Mutasi dari rekening koran nasabah,
- b. Kegiatan usaha dan kemajuan usaha nasabah, Kegiatan usaha nasabah dapat dilihat dari laporan-laporan yang diminta dari nasabah antara lain: laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan
- c. Meninjau langsung tempat usaha nasabah, agar ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik,

2.2 Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Agar kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka proses pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memenuhi prinsip pengendalian kredit. Secara garis besar prosedur pemberian kredit dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Permohonan kredit dari calon debitur disampaikan kepada direktur bank,
- b. Biro pemberi kredit, meneliti lebih seksama permohonan kredit tersebut apakah kredit yang dimohonkan telah sesuai dengan perencanaan dan program kredit yang ditetapkan.
- c. Para analis kredit, melakukan penelitian kembali atas permohonan kredit yang diajukan
- d. Biro pemberi kredit, membuat rekomendasi dan menyampaikan permohonan aplikasi kredit tersebut
- e. Pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi atau tidak. andaikata permohonan kredit tersebut layak diberikan, maka tindakan yang harus dilakukan manajemen bank adalah melakukan pengawasan dan pembinaan secara terus menerus kepada para debitur yang bersangkutan. Mulai dari penggunaan dana yang berasal dari fasilitas kredit yang diberikan samapai dengan kredit itu seluruhnya dapat dilunasi.

2.3 Kolektibilitas Kredit

Berdasarkan surat edaran BI No: SE-26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang dimaksud dengan kolektibilitas aktiva produktif adalah ”Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya” (1993, 120). Keputusan direksi BI Nomor: 26/22/Kep/Dir tanggal 29 Mei

1993 menetapkan kriteria kolektibilitas piutang kredit yang secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- (a) Lancar
- (b) Kurang lancar
- (c) Diragukan: Piutang kredit dapat digolongkan sebagai kriteria diragukan, apabila tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan kriteria lancar, tetapi kredit masih dapat diselamatkan dan jaminannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur, atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapi jaminan masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.
- (d) Macet, Suatu pinjaman digolongkan macet apabila Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.

Dengan demikian untuk mengetahui tingkat kesehatan kredit tersebut telah dikeluarkan SK DIR BI No. 31/147/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 sebagai pedoman untuk menilai tingkat kolektibilitas kredit sebagai berikut:

$$NKK = \frac{(25\% \times DPK) + (50\% \times KL) + (75\% \times D) + (100\% \times M)}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}} \times 100\%$$

Keterangan:

DPK	=	Dalam Perhatian Khusus
KL	=	Kurang Lancar
D	=	Diragukan
M	=	Macet

Ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank berkinerja baik mencatat kredit macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performance Loan*). Nilai kolektibilitas kredit kita gunakan sebagai dasar perhitungan kualitas aktiva produktif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KAP = \frac{15,5 - NKK}{0},15 \times 1$$

3. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu Metode penelitian yang menggambarkan hubungan antara sub variabel Independen (pengendalian intern) dan variable dependen (kolektibilitas kredit) melalui uji regresi dan korelasi. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Berikut ini disajikan Tabel operasional variabel X dan Y, yaitu:

Tabel 1
Operasional Variabel

Keterangan	Variabel	Sub Variabel	Indikator
Struktur Pengendalian	X	Unsur-Unsur SPI	Lingkungan Pengendalian : 1. Struktur organisasi dan satuan usaha

Intern			2. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. 3. Falsafah manajemen dan gaya operasinya. 4. Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk. 5. Metode pengendalian manajemen dalam memonitor dan menindak lanjuti kinerja, termasuk audit intern. 6. Kebijakan dan praktek personalia Sistem Akuntansi: Mencatat transaksi secara sah, Menentukan periode waktu terjadinya transaksi, Dokumen yang memadai Prosedur Pengendalian: Review kinerja, Pengolahan informasi, Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, Pemisahan tugas
Kolektibilitas Kredit	Y	Tingkat Kolektibilitas Kredit	Membandingkan antara jumlah kredit yang diterima dengan tingkat kolektibilitas yang diterima dengan kriteria: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet

4. Hasil Penelitian dan Bahasan Penelitian

4.1. Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemberian Kredit

Berdasarkan penelitian dapat diungkapkan bahwa prosedur pemberian kredit maupun supervise kredit yang diterapkan pada BPR Universal Karya Mandiri puncak mengacu kepada Buku Pedoman Pemberian Kredit yaitu mengenai organisasi kredit, prosedur pemberian kredit, supervise kredit, formulir-formulir yang dipergunakan dalam proses pemberian kredit.

Adapun struktur pengendalian intern yang diterapkan dalam proses pemberian kredit secara umum cukup memadai yaitu proses pemberian kredit melalui tahap-tahap yang dimulai dari tahap pendekatan, tahap permohonan resmi, tahap identifikasi, tahap appraisal, tahap legal/komitmen dan tahap realisasi.

Apabila dianalisis secara parsial pelaksanaan pengendalian Intern Pemberian kredit di BPR. Universal Karya Mandiri sebagai berikut:

1. Adanya struktur organisasi kredit yang cukup memadai yang berpedoman kepada surat keputusan Direksi maupun Buku Pedoman Pemberian Kredit.
2. Sistem otorisasi dan uraian tugas yang jelas untuk masing-masing unit organisasi maupun bagi masing-masing personil, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab akan jelas dan pelaksanaan kerja akan lancar.
3. Pada system tahap prosedur pemberian kredit telah diterapkan prinsip pengendalian antara lain:
 - a. Pada tahap pengenalan/pendekatan, calon debitur telah diseleksi yaitu dengan diteliti apakah yang bersangkutan termasuk dalam daftar hitam BI dan meminta keterangan kepada Bank lain.
 - b. Pada saat permohonan resmi, dilakukan identifikasi terhadap proyek, orang atau badan yang mengajukannya untuk mengetahui keabsahan dan kewajarannya. Laporan identifikasi proyek disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diteliti lebih lanjut dan mendapat persetujuan.
 - c. Pada tahap appraisal (penelitian proyek) dilakukan, petugas analisis melakukan analisisnya dari dan terhadap berbagai aspek dan harus menerapkan prinsip "5C", dilakukan kunjungan kelokasi proyek untuk meyakinkan eksistensi dan keabsahannya. Laporan appraisal atau penilaian proyek direview dan dibahas melalui Kepala Bagian, Kepala Biro, Direksi, atau Komite Kredit.

- d. Pada saat legalisasi kredit dilakukan, perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan kredit dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan untuk batas-batas kredit tertentu yang jumlahnya tidak terlalu material.
- e. Pada saat realisasi kredit dilakukan, terlebih dahulu berkas-berkas kredit diteliti kembali untuk meyakinkan bahwa persyaratan yang diminta sudah dipenuhi.
- f. Digunakan formulir-formulir maupun dokumen-dokumen yang sudah distandarisasi, sehingga sederhana dan mudah dalam mengerjakannya.

Pada setiap kredit yang diberikan diberlakukan pengawasan yang ketat yaitu dengan adanya supervise kredit yang dilakukan sejak pembahasan kredit sampai dengan kredit dinyatakan selesai, sehingga nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit dari BPR Universal Karya Mandiri Puncak tidak terlepas dari pantauan bank. Dengan demikian keamanan kredit yang disalurkan akan lebih terjamin dalam proses pengembaliannya.

4.2. Analisis Kolektibilitas Kredit

Dari data kolektibilitas BPR Universal Karya Mandiri Puncak dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2008 sampai dengan 2010 yang akan disajikan dalam Tabel 2 dan 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Kredit Yang Disalurkan PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak
Per 31 Desember 2008, 2009, 2010 (Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Kredit yang Disalurkan
2008	16.609.030.584
2009	20.581.296.824
2010	18.834.320.008

Sumber: Laporan Publikasi PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak

Tabel 3
Tingkat Kredit Yang Dicapai
PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak

Ket	Lancar		Dalam Perhatian Khusus		Kurang Lancar		Diragukan		Macet	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2008	16.089.167.927	96,9	159.446.694	1	78.062.444	0,5	282.353.520	1,7	-	0
2009	20.379.600.115	99	-	0	37.046.334	0,2	14.406.908	0,1	150.243.467	0,7
2010	18.476.467.928	98,1	131.840.240	0,7	43.318.936	0,2	60.269.824	0,3	122.423.080	0,7

Sumber: Laporan Publikasi PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak

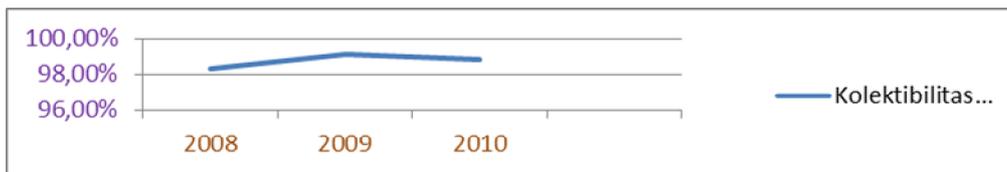
Dengan melihat Tabel 2 dan 3 diatas tingkat kolektibilitas kredit BPR Universal Karya Mandiri Puncak dapat dianalisis sebagai berikut:

Nilai kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bank kinerjanya baik mencatat kredit macet maksimal 5%, mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI dalam *Non Performance Loan* (NPL). Dari hasil

perhitungan menggunakan dasar tersebut maka nilai kolektibilitas kredit untuk PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak untuk tahun 2008 nilai kolektibilitasnya adalah sebesar 1,75%, untuk tahun 2009 sebesar 0,9%, dan untuk tahun 2010 sebesar 1,18%. Hal ini berarti bahwa jumlah kredit yang bermasalah tahun 2008 sebesar 1,75%, tahun 2009 sebesar 0,9% dan tahun 2010 sebesar 1,18%. Artinya bahwa kredit pada BPR Universal Karya Mandiri Puncak cukup kaloktabel karena dari total kredit yang disalurkan setiap tahun menyatakan kinerja bank baik karena kredit macet jauh di bawah ketentuan Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 5%.

Untuk kolektibilitas yang dicapai pada tahun 2008 sampai 2010 pencapaian ini tidak lepas dari efektivitas pengendalian dan operasional dalam menjalankan kerjanya sesuai prosedur operasional standar, sehingga dapat disimpulkan bahwa unit kerja operasional efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta lebih hati-hati dan teliti sehingga menghasilkan pengendalian dan kinerja perusahaan yang meningkat.

Berikut digambarkan dalam bentuk diagram untuk melihat kenaikan dan penurunan tingkat kolektibilitas kredit PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak Cipanas sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan Kolektibilitas Kredit

Grafik 1
Tingkat Kolektibilitas Kredit PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak

4.3. Uji Regresi

Untuk menghitung seberapa besar hubungan pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit, maka data tersebut di olah lebih lanjut dan disajikan dalam tabel penolong untuk mempermudah analisis statistik yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit. Maka regresi sederhana dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini (untuk nilai a dan b, dapat dicari dengan menggunakan persamaan) sebagai berikut:

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$Y = a + bX$$

$$b = \frac{32(271014) - (2244)(1929)}{32(316282) - (2244)^2} = \frac{8672448 - 4328676}{10121024 - 5035536} = \frac{4343772}{5085488} = 0,85$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n} = \frac{1929 - 0,85(2244)}{32} = \frac{1929 - 1907,4}{32} = \frac{21,6}{32} = 0,675$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, koefisien arah regresi b adalah sebesar 0,85 pada konstanta a sebesar 0,675 Dengan demikian, bentuk pasangan variabel ini dapat digambarkan melalui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,675 + 0,85X$$

Hal ini menyatakan dengan konstanta sebesar 0,675, artinya jika pengendalian intern (x) adalah 0 (nol), maka kolektibilitas kreditnya adalah 0,675. Besarnya tingkat kolektibilitas kredit pada PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak akan meningkat dengan adanya peningkatan sebesar satuan nilai pengendalian intern, dengan kata lain jika pengendalian intern nilainya = 1, maka kolektibilitas kredit akan meningkat sebesar 0,85. Koefisien bernilai positif antara pengendalian intern dan kolektibilitas kredit, semakin tinggi tingkat pengendalian intern maka akan semakin tinggi pula kolektibilitasnya.

4.4. Uji Korelasi

Menghitung kekuatan hubungan antara variabel pengendalian intern (X) dengan variabel kolektibilitas kredit (Y), koefisien korelasi *Person Product Moment* pasangan variabel ini adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad (IV.1)$$

$$r_{xy} = \frac{32(271014) - (2244)(1929)}{\sqrt{\{32(316282) - (2244)^2\} \{32(254711) - (1929)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{8672448 - 4328676}{\sqrt{(5085488)(4429711)}}$$

$$r_{xy} = \frac{4343772}{\sqrt{22.407.639.936.968}} \quad r_{xy} = \frac{4343772}{4733670,87} \quad r_{xy} = 0,9176$$

Besarnya hubungan antara variabel X dan Y adalah sebesar 0,9176, maka dapat diinterpretasikan bahwa ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pengendalian intern dan kolektibilitas kredit.

Untuk mengukur besarnya hubungan variabel pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit dan menguji signifikansi hubungan dalam korelasi, maka harus menggunakan perhitungan koefisien determinasi (Kd) dan uji signifikansi (uji t), yaitu sebagai berikut:

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kelayakan atau kesesuaian garis regresi terhadap sekumpulan data. Batas nilai koefisien determinasi (r^2) adalah antara 0% sampai dengan 100%. Maka koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \cdot 100\%$$

$$Kd = 0,91^2 \cdot 100\%$$

$$Kd = 0,8281 \cdot 100\% \quad Kd = 82,81\%$$

b. Uji t, digunakan untuk melakukan uji hipotesis, hipotesis diuji dengan $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan df (n-2) dan t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} . Pengujian hipotesis dilakukan dengan rumus:

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian intern terhadap kolektibilitas kredit.
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian intern dan kolektibilitas kredit.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (VI.3) \quad t = \frac{0,91\sqrt{32-2}}{\sqrt{1-(0,8281)^2}} t = \frac{0,91\sqrt{30}}{\sqrt{0,6857}} t = \frac{4,98}{0,56} t = 8,9$$

Untuk nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan df (n-2) adalah sebesar 2,042272. Berdasarkan hasil perhitungan diatas $t_{hitung} 8,9 > t_{tabel} 2,036933$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pengendalian intern dengan kolektibilitas kredit.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pengendalian Intern Pemberian Kredit berperan dalam mengamankan kolektibilitas kredit dapat diterima sesuai dengan kasus yang diteliti pada BPR Universal Karya Mandiri Puncak.

5.1 Kesimpulan

1. Pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan pada BPR Universal Karya Mandiri Puncak telah menerapkan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit.
2. Kolektibilitas kredit PT. BPR Universal Karya Mandiri Puncak secara keseluruhan kolektible yaitu dengan rata-rata 99,056%.
3. Pengendalian intern pemberian kredit mempunyai peranan yang signifikan dalam menunjang pengamanan kolektibilitas kredit dengan tingkat signifikansi 0.05 dan mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat korelasi 91,76%.

6. Daftar Pustaka

Bank Indonesia. No. 26/22/Kep/Dir. Tentang Kriteria Kolektibilitas. 1993.

Kasmir.SE.,MM *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi enam. Jakarta:Penerbit Raja Grafindo Persada. 2002.

-----, *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi pertama. Jakarta Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada.2002

- Lapoliwa, N. *Akuntansi Perbankan*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2000.
- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Edisi Kedua. Penerbit Ghalia Indonesia. Ciawi Bogor. 2005
- Mulyadi. *Auditing*. Edisi Enam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2002.
- _____. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2001.
- Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2004
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi Delapan. Bandung: Penerbit ALFABETA. 2009.
- Sukrisno Agoes. *Auditing*. Edisi Tiga. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 2004.
- Thomas Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditian*. Edisi Keempat. Jakarta. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995
- Tunggal, Amin Wijaya. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta. 2005.